

DEWAN PIMPINAN NASIONAL HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA

Sekretariat: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Gedung Arsip Lantai Dasar Jl. Harsono RM No.3 Ragunan, Jakarta Selatan 12550. Telp./Fax. +6221 788 388 42 Website: www.hkti.id Email: sekretariat dpn@hkti.id

Pandangan dan Sikap Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Tentang Pupuk Bersubsidi

Pupuk Bersubsidi Harus Direformasi Total

Salam Tani Makmur.

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia menyigi bahwa alokasi anggaran untuk pupuk bersubsidi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir rerata 30 triliun per tahun. Namun selalu muncul kelangkaan pupuk bersubsidi menjelang musim tanam.

Terkait ini, Pemerintah selalu beralasan Jumlah pupuk subsidi yang dimintakan 23 juta ton sedangkan yang disediakan hanya 9 juta ton, pantas jika ketersediaan selalu bermasalah.

Kajian HKTI mendapatkan fakta yang cukup mengejutkan sebagai berikut:

Pertama, kapasitas produksi Pupuk Indonesia sekitar 12 juta ton per tahun. Artinya 75% dari kapasitas produksi sudah dialokasikan untuk subsidi. Mengapa permintaan pupuk subsidi sampai 23 juta ton? Ini jelas permintaan subsidi yang tidak masuk akal sehat, butuh reformasi total.

Kedua, telisik lebih lanjut menunjukan besarnya permintaan pupuk subsidi ternyata karena didasari oleh kebijakan subsidi diberikan kepada petani penggarap dengan luas maksimal 2 ha dan untuk semua komoditi pangan yang ditanam (mencakup 70 komoditas).

Ketiga, fakta dilapangan jika dalam satu luasan katakanlah 1 ha dilakukan pertanaman tumpang sari dengan 3 komoditas maka masing-masing komoditas diklaim berluas tanam 1 ha sehingga hasil akhir yang butuh disubsidi adalah 3 ha.

Keempat, fakta lain adalah kondisi Tanah Indonesia sebagian besar lahan suboptimal dengan kondisi asam dan tidak sehat.



DEWAN PIMPINAN NASIONAL HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA

Sekretariat: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Gedung Arsip Lantai Dasar Jl. Harsono RM No.3 Ragunan, Jakarta Selatan 12550. Telp./Fax. +6221 788 388 42 Website: www.hkti.id Email: sekretariat_dpn@hkti.id

Untuk menyelesaikan sengkarut pupuk bersubsidi HKTI berpandangan dan mengusulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pupuk bersubsidi hanya diberikan kepada 3 komoditas pangan utama, yaitu; Padi, Jagung dan Tebu Rakyat.
- 2. Penerima pupuk bersubsidi adalah usaha tani dengan luasan maksimal 2 ha.
- 3. Mengingat banyak usaha tani yang berskala mikro maka perlu penambahan jenis kemasan 20 kg.
- 4. Pupuk Indonesia sudah mengembangkan sistem informasi pupuk namun hanya sampai lini 3, sedangkan petani membeli pupuk di lini 4, untuk itu butuh integrasi sistem sampai lini 4.
- 5. Mengingat lahan-lahan yang cenderung memiliki tingkat keasaman relatif rendah maka dibutuhkan dolomit untuk menaikan ph tanah dan kesehatan tanah sehingga pemakaian pupuk Phospat dan Kalium menjadi optimal. Perlu memasukan dolomit sebagai bagian dari pupuk bersubsidi atau dalam program tersendiri, yakni program penyehatan tanah menggunakan dolomit.
- 6. Perlu diterapkan Penggunaan pupuk berimbang.
- 7. Jenis pupuk yang disubsidi hanya Urea saja, untuk Phospat dan Kalium bahan baku sepenuhnya diimpor sehinga disubsidi maupun tidak disubsidi sama saja.

Demikian pandangan dan sikap Himpunan Kerukunan Tani Indonesia terkait masalah pupuk bersubsidi dalam rangka memajukan pertanian dan memakmurkan petani Indonesia.

Jakarta, 21 Maret 2022

DEWAN PIMPINAN NASIONAL HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA

Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc Ketua Umum <u>Ir. Sadar Subagyo</u> Sekretaris Jenderal

HIMPIDIAN KERUKUNAN TAHI INDONESIA